



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 – 2020**

Disusun Oleh:

Arif Alfajar

NIM : 1804431006

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 – 2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana skripsi

Disusun Oleh:  
**Arif Alfajar**  
NIM : 1804431006

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2022**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Arif Alfajar

NIM : 1804431040

Tanda tangan : n :



Tanggal : 29/08/2022

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Arif Alfajar

NIM : 1804431006

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015-2020.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya P.S. S.E., M.Ak (  )

Anggota Penguji : Dr. Ali Masjono Mukhtar, SE, M.B.I.T (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29/08/2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Arif Alfajar  
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431006  
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Ali Masjono Mukhtar, SE, M.B.I.T

NIP. 195909211989031002

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.

NIP. 196302031990031001

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, karunia serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020” secara tepat waktu. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, saran, kritik dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Eng. HTL., MT. Selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak, C.P.I.A selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Dr. Ali Masjono Mukhtar, SE, M.B.I.T. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak selaku dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan saya bantuan berupa arahan serta nasihat dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan
7. Bapak Warjiyo dan Ibu Titing Mintarsih selaku orang tua serta Mochammad Rachmandani selaku kakak yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis
8. Aflah, Gunawan, Dito, Rizqi, Shason, Puspa, Nabila, Rara, Shafira selaku sahabat yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, dan mendengarkan keluh kesah selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman AKT 8B yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, 29 Agustus 2022

Mahasiswa,

Arif Alfajar

NIM. 1804431006





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Alfajar  
NIM : 1804431006  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020**

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 29/08/2022

Yang menyatakan

  
Arif Alfajar



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 – 2020

Oleh :

**Arif Alfajar**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan, kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas belanja, serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kemudian diinterpretasikan serta implikasi hasil pengukuran kinerja tersebut. Serta untuk mengetahui perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan Permendagri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor tahun 2015-2020.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 dengan menggunakan Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah masuk kedalam kategori Cukup. Rasio ketergantungan memperoleh kategori Tinggi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh kategori partisipatif. Rasio Efektivitas memperoleh kategori sangat efektif. Rasio Efisiensi jika dinilai memperoleh kategori tidak efisien. Rasio Keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul bila dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhan menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%. Serta Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan percepatan penanganan covid 19 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2020

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Interpretasi, dan implikasi hasil pengukuran, Penerapan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ABSTRACT**

**FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF BOGOR REGENCY 2015 – 2020**

*This research aims to identify and analyze the financial performance of the Bogor Regency Government which is measured using the ratio of degrees of fiscal decentralization, dependence, independence, effectiveness, efficiency, spending activities, and growth of Regional Original Revenue, then interpreted and the implications of the performance measurement results. And to find out changes in the allocation and use of regional revenue and expenditure budgets in the context of implementing Permendagri of the Republic of Indonesia Number 39 of 2020.*

*This research uses descriptive quantitative method using documentation technique for data collection. The data used is secondary data in the form of the 2015-2020 Bogor Regency Budget Realization Report.*

*The results of the study show that the performance of the Bogor Regency Government in 2015-2020 by using the ratio of the degree of government fiscal decentralization is in the Enough category. The dependency ratio is obtained in ed the High category. The Regional Financial Independence Ratio is in the participatory category. The Effectiveness Ratio is categorized as very effective. Efficiency Ratio if judged to obtain inefficient category. The Harmony Ratio is seen from the average expenditure of the two, operating expenditure is superior to capital expenditure. The Growth Ratio shows a positive trend of 10.21%. And the Ministry of Home Affairs Regulation Number 39 of 2020 has a strong influence in the implementation of the acceleration of handling Covid 19 which has been regulated in Bogor Regent Regulation Number 20 of 2020*

*Keywords: Regional Financial Performance, Interpretation, and implications of measurement results, Application of Ministry of Home Affairs Regulation No. 39 of 2020*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Keuangan Daerah .....	11
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	12
2.3 Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.4 Rasio Kinerja Keuangan.....	16
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
2.6 Kerangka Konseptual .....	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN .....	24



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Objek Penelitian .....	24
3.4 Jenis dan sumber data Penelitian.....	25
3.5 Metode Pengumpulan data .....	26
3.6 Reliabilitas dan Validitas.....	26
3.7 Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>29</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	29
4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio.....	30
4.3 Interpretasi Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2015-2020.....	37
4.4 Pengaruh dari Penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 .....	45
4.5 Implikasi Hasil Pengukuran Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan .....	49
<b>BAB V.....</b>	<b>53</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 .....	3
Tabel 2. 1 Kategori Derajat Desentralisasi Fiskal.....	16
Tabel 2. 2 Kategori Ketergantungan Daerah.....	17
Tabel 2. 3 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuann Daerah.....	18
Tabel 2. 4 Kategori Penilaian Efektivitas Pendapatan Daerah .....	19
Tabel 2. 5 Kategori Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan.....	19
Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	30
Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Rasio Ketergantungan Daerah .....	31
Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	32
Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Kabupaten Bogor .....	33
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi .....	34
Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Rasio Keserasian Belanja Operasi.....	35
Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Rasio Keserasian Belanja Modal.....	35
Tabel 4. 8 Hasil Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pendapatan .....	36
Tabel 4. 9 Pembebanan Belanja Daerah .....	46
Tabel 4. 10 Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 .....	48



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran..... 23





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2015.....	58
LAMPIRAN 2	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016.....	60
LAMPIRAN 3	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2017.....	62
LAMPIRAN 4	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2018.....	64
LAMPIRAN 5	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2019.....	66
LAMPIRAN 6	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2020.....	68





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan selalu menjadi acuan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif, dan efisien, mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar, itu berarti pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada bantuan dari pusat melalui dana perimbangan. Namun bukan berarti jika tingkat kemandirian daerah tinggi, maka daerah tidak membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan akan tetap dibutuhkan oleh pemerintah daerah berguna dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus lebih menggali potensi daerahnya, dan meningkatkan sumber keuangannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terpenting dalam mengerahkan dana penyelenggaraan daerah, oleh karena itu seringkali PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Lembaga Pemerintah pada umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang. Kegiatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat sering menjadi sorotan publik, karena seiring kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari instansi pemerintah tersebut yang dinilai kurang



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

maksimal seperti dalam persoalan pendapatan dan pembelanjaan anggaran sering terjadi kurangnya perencanaan anggaran, pemborosan dana, penyelewengan dana, dan penyelenggaraan administrasi publik yang kurang efisien dan transparan sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat. Kondisi ini mendorong adanya pemeriksaan dalam kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh rencana anggaran, dengan alasan yaitu semakin banyak rencana anggaran semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk rencana anggaran belanja tersebut.

Sehingga pemerintah daerah secara terus menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting dilakukan karena dengan begitu kita dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap tahunnya, sehingga ditahun berikutnya pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kerjanya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki keleluasaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahannya, namun disisi lain pemerintah daerah tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat di daerah otonom tersebut.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran				
	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Belanja Daerah	Surplus/ (Defisit)
2015	Rp6.032.847.734.882	Rp 2.002.209.819.261	Rp 2.583.489.732.475	Rp 5.638.198.865.486	Rp 394.648.869.396
2016	Rp5.973.280.685.746	Rp 2.292.175.674.801	Rp 2.692.167.023.139	Rp 6.465.300.553.876	-Rp 492.019.868.130
2017	Rp6.975.053.078.040	Rp 3.041.872.447.905	Rp 2.742.839.370.823	Rp 6.875.742.319.986	Rp 99.310.758.054
2018	Rp7.300.403.120.900	Rp 2.794.660.740.152	Rp 2.818.814.498.138	Rp 7.304.964.072.680	-Rp 4.560.951.779
2019	Rp8.137.989.873.806	Rp 3.161.165.915.498	Rp 3.094.445.817.299	Rp 7.771.218.179.777	Rp 366.771.694.029
2020	Rp7.687.179.717.004	Rp 2.810.155.352.282	Rp 4.126.378.593.406	Rp 8.405.493.380.579	-Rp 718.313.663.575

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor

Berdasarkan tabel diatas terlihat tren APBD Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terkecuali tahun 2016 mengalami peningkatan pada pendapatan daerah yang cukup signifikan. Meskipun pendapatan tahun 2016 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 59.567.049.136 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun mengalami peningkatan cukup besar di tahun 2017 sebesar Rp. 1.001.772.392.294, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 325.350.042.860, lalu di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 837.586.752.906, Sedangkan tahun 2020 kembali mengalami penurunan Rp. 450.810.156.802.

Selain itu, jika dilihat kembali pada tahun 2016, 2018, dan 2020 mengalami defisit anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Dengan pendapatan yang kecil tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor belum mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun tetap mengalami defisit. Seharusnya ketika pertumbuhan pendapatan daerah semakin tinggi, maka pemerintah daerah mampu dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan pendapatan daerah nya. Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, penulis berasumsi bahwa realisasi anggaran



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pendapatan dan belanja daerah akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jika mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Ketidakstabilan pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu disebabkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kelemahan aspek perumusan strategi dan pengawasan yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Serta kualitas evaluasi program yang dilakukan belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar Pemerintah Daerah dan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum mampu memicu perbaikan penerapan manajemen kinerja.

Pada table 1.1 juga terlihat bahwa pada tahun 2015, 2016, 2018, 2020 Dana Perimbangan lebih besar bila dibandingkan dengan PAD. Hal yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2018, pada tahun tersebut pendapatan asli daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan pada dana perimbangan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah bukan saja menjadi indikator penting kemandirian daerah, akan tetapi dapat pula diukur dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Jika pendapatan berasal dari dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD, hal ini akan mengindikasikan bahwa masih besarnya pendanaan dari luar dibandingkan pendapatan yang berasal dari dalam daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus lebih menggali potensi daerahnya, dan meningkatkan sumber keuangannya. Mahmudi dalam suprianto (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kemandirian. Hal ini selaras dengan maksud otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain itu, sejak kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) pertama kali diumumkan di Indonesia pada April 2020, pemerintah telah melakukan berbagai langkah yang diharapkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, antara lain menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik, menerapkan bekerja dari rumah, Pelajar belajar dari rumah (*online*), menutup pusat perbelanjaan, tempat wisata dan tempat ibadah, mendirikan posko pengendalian COVID-19 di perbatasan daerah dan mengurangi kepadatan pekerja di berbagai sektor, sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat.

Terganggunya aktifitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2020, baik sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBD Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Daerah.

Pemerintah pusat merespon fenomena pandemi covid 19 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa penyesuain alokasi anggaran di prioritaskan untuk : (a) penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan. (b) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan (c) Penyediaan jaring pengaman social/social safety net.

Pada tabel 1.1 mencatat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 351 miliar dari Rp. 3,16 triliun menjadi Rp. 2,81 triliun. Hal itu berbanding terbalik dengan angka realisasi belanja Pemerintah Kabupaten bogor yang justru meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 8,4 triliun dari tahun sebelumnya yang senilai Rp. 7,7 Triliun. Penurunan pada kinerja keuangan daerah tersebut kemungkinan adanya perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan Permendagri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, maka harus adanya penetapan standar yang menjadi acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien serta akuntabel sehingga diperlukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan menjadi tolak ukur dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah tahun selanjutnya.

Menurut Halim (2007) tujuan pengukuran kinerja menilai kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi keuangan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan dan pengeluaran pembiayaan lainnya, mengukur peran masing-masing sumber pendapatan dalam penyusunan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan perolehan pendapatan selama periode tertentu. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik dengan melakukan analisis rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bogor yang berkenaan dengan penganalisisan laporan daerah setempat yang tertuang dalam penelitian ini dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 ”

### 1.2 Rumusan Masalah

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 Tahun (2015-2020) bisa dikatakan belum mengefisienkan pendapatan yang dimiliki, hal itu disebabkan kenderungan lebih besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah sehingga seringkali terjadi defisit yang mengakibatkan daerah belum mampu dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Selain itu keberhasilan menggali dan meningkatkan potensi PAD merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kemandirian suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Pendapatan asli daerah bukan saja menjadi indikator



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penting kemandirian daerah, akan tetapi dapat pula diukur dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah

Terlihat pada latar belakang bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah karena besarnya pendapatan yang berasal dari dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan bahwa masih besarnya ketergantungan terhadap pendanaan dari luar dibandingkan pendapatan yang berasal dari dalam daerah.

Kemampuan dalam memobilisasi penerimaan pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditargetkan juga merupakan sebuah hal yang penting dikarenakan menimbulkan efektivitas dalam memaksimalkan seluruh sumber pendapatan yang dimiliki. Maka diperlukan perumusan strategi yang matang agar target penerimaan dengan realisasi bisa selaras.

Pada era pandemi ini terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, tahun 2020 mengalami penurunan. Hal itu berbanding terbalik dengan angka realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bogor yang justru meningkat pada tahun 2020. Penurunan pada kinerja keuangan daerah tersebut kemungkinan adanya perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan Permendagri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020.

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang bertujuan menilai kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi keuangan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan dan pengeluaran pembiayaan lainnya, mengukur peran masing-masing sumber pendapatan dalam penyusunan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan perolehan pendapatan selama periode tertentu. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah yaitu rasio derajat Desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang diatas, maka timbul pertanyaan yang tepat untuk penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor selama enam tahun terakhir (2015-2020) dengan menggunakan analisis Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio ketergantungan Daerah, Rasio kemandirian, Rasio efektivitas dan efisiensi, Rasio keserasian, Rasio pertumbuha PAD?
- 2) Bagaimana hasil penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaen Bogor dalam enam tahun terakhir (2015-2020) ?
- 3) Bagaimana dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah serta pengaruh dari penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020?
- 4) Bagaimana hasil pengukuran dapat diimplikasi dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian memiliki tujuan penelitian sebagai berikut.

- 1) Untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020.
- 2) Untuk menginterpretasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan tahun 2015-2020
- 3) Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.
- 4) Untuk mengetahui implikasi hasil pengukuran dalam meningkatkan kinerja keuangan tahun 2015-2020.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoritis



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan dengan menambah bahan literasi dan referensi mengenai kemampuan dan kinerja keuangan daerah.

### 2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak.

#### a. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk tahun selanjutnya.

#### b. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan serta membantu penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang mengenai keputusan mahasiswa dalam memilih analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut.

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini membahas mengenai laporan keuangan daerah, analisis kinerja dan kemampuan keuangan menggunakan rasio keuangan, Selain itu terdapat juga penelitian terdahulu yang menjadi referensi serta perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab ini akan berfokus kepada metode serta jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, serta metode analisis data yang akan dilakukan.

### BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Bogor, analisis kinerja keuangan Kabupaten Bogor selama periode tahun 2015-2020 serta menganalisis pengaruh dari penerapan permendagri No. 32 Tahun 2020.

### BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, implikasi serta saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil serta interpretasi pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio menunjukkan data sebagai berikut:
  - a) Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh presentase sebesar 38,14% artinya dalam enam tahun terakhir pemerintah Kabupaten Bogor masuk kedalam kategori Cukup. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan berupaya meningkatkan PAD dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggalih potensi-potensi yang baru. Serta dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah agar PAD memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah
  - b) Rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bogor secara keseluruhan memperoleh presentase sebesar 40,10%, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori Tinggi. Namun hal ini disebabkan karena tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan pada tahun 2015-2016. Sedangkan tahun berikutnya sudah memperoleh kategori cukup. Pemerintah Kabupaten Bogor harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber potensi yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan akan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat.
  - c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, jika dinilai secara keseluruhan memperoleh presentase sebesar 67,86% maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori partisipatif atau sudah bisa dikatakan peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, terlihat bahwa daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

otonomi daerah karena tingkat kemandirian sudah cukup tinggi. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemerintahan daerah agar selaras dengan asas desentralisasi yang menuntut setiap daerah mampu dan mandiri dalam melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawabnya sendiri.

- d) Rasio Efektivitas jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015-2020 maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori sangat efektif, karena memperoleh presentase rasio sebesar 102,83% artinya pemerintah Kabupaten Bogor mampu memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai rencana yang ditargetkan. Namun terjadi trend penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat anggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah daerah diharuskan mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan realisasi, serta memerlukan kreatifitas dalam mencari sumber potensi pendapatan baru.
- e) Rasio Efisiensi jika dinilai secara memperoleh presentase sebesar 100,86%, maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tidak efisien, Rasio efisiensi, Pemerintah Kabupaten Bogor masih sangat buruk dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Perlu adanya strategi untuk menghitung secara cermat biaya yang baik serta membenahan dalam meminimalisir penggunaan anggaran belanja.
- f) Rasio Keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul dengan 65,07% sedangkan belanja modal hanya sebesar 21,20%. Artinya pemerintah Kabupaten Bogor tidak Fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor cenderung tidak fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana dikarenakan masih besarnya pengeluaran rutin guna memenuhi aktivitasnya pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.
- g) Rasio Pertumbuhan jika dilihat presentase rata-rata kurun waktu 2015-2020 menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%. Pada rasio pertumbuhan Kabupaten Bogor masih mengalami naik turun serta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- terdapatnya trend negatif dan yang artinya terjadi ketidakstabilan dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang seharusnya diperbaiki. Sangat diperlukan perumusan strategi yang baik serta evaluasi pada periode sebelumnya, sehingga dapat mengetahui potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut tentu akan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan percepatan penanganan covid 19 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2020 yang mana dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan belanja tidak terduga sebagai alat utama dalam pembiayaan penanganan pandemi covid 19 yang sangat sesuai dengan maksud sebenarnya dari penggunaan belanja tak terduga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta penjelasan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.
  3. Implikasi hasil pengukuran dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor:
    - a. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, dikarenakan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan. Hal itu yang membuat Kabupaten Bogor memperoleh kategori yang belum memuaskan pada rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantunga, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD yaitu dikarenakan masih terhitung kecilnya PAD bila dibandingkan dengan pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. maka dari itu PAD dijadikan sebagai alat utama dalam mengantisipasi apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
    - b. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan reconfusing belanja daerah, dalam hal ini pemerintah perlu mengurangi porsi anggaran belanja



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

rutinnya dikarenakan belanja rutin selalu mengalami kenaikan bila dibandingkan belanja modal. Pemangkasan perlu dilakukan untuk menghemat biaya sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa difokuskan dan diprioritaskan untuk penanggulangan covid-19

## 5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) utamanya pada era pandemi covid-19 maupun pasca pandemi covid-19 dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang menjadi potensi utama melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kekuatan utama untuk menambah PAD, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam kemandirian daerah serta mengantisipasi apabila terjadi penurunan dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan strategi dalam penggunaan anggaran belanjanya dengan tepat, baik serta menghitung secara cermat besaran biaya yang akan dikeluarkan serta memprioritaskan belanja yang sangat dibutuhkan. Sehingga akan menimbulkan efisien dalam penggunaan dana belanja. Serta harapannya pemerintah lebih proposional didalam mengalokasikan belanjanya, terutama harus ada peningkatan dalam belanja modal hal tersebut untuk mewujudkan misi Kabupaten Bogor yaitu meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menganalisis di periode selanjutnya agar berguna dalam melihat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum pademi covid-19, saat terjadi pademi covid-19 serta pasca pandemi covid-19 sehingga akan terlihat dengan jelas perubahan pada kinerja keuangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah Kabupaten Blora Tahun (2007 - 2011). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andayani, Wuryan. (2007) *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmawati, Lilis. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Aziz, Nasir. (2017). "Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah ( Perencanaan dan Penganggaran)". Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) Unsyiah Darussalam 31 Januari 2007. Aceh: FE Unsyiah Darussalam.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Kabupaten Bogor Dalam Angka 2020, Bogor. Diambil dari <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- Basuki, (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nordiawan Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erlina, O.S. Rambe, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah : Berbasis Akrual*. Jakarta. : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Halim, Abdul. dan Iqbal, Muhammad. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta. : Penerbit Salemba Empat
- Haryanto, A. (2014). Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hoessein, B. (1993). *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besar-nya Otonomi Daerah Tingkat II. "Disertasi"*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kerja Sektor Publik edisi revisi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahmudi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres : Yogyakarta
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Mardiasmo, (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Government Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*. Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Offsite
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kerja Sektor Publik edisi revisi*. Yogyakarta : UPP
- Munir, Dasril, Tangkilisan, (2004). *Kebijakan dan Manjemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Nurhayati, Putri. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nurjuha, Anas Arista, (2009) Mengukur Tingkat Efektivitas, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Prawirosetoto, Yuwonono. (2002). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Agustus, Unika Atmajaya, Jakarta.

Purba, Ris Ulina. (2012). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.

Puspitasari, Ayu Febriyanti. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Republik Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia

Republik Indonesia. 2006. *Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia.
- Republik Indonesia. 2020. *Permendagri No. 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Undang-Undang Indonesia
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Bupati Bogor No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Deases 2019 (COVID-19)*. Bogor: Undang-Undang Indonesia
- Sekaran, Uma., Bougic, R. (2016). *Research Methods for Business (7th ed)* John Wiley & Sons, Inc
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Susilawati, Desi., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91-99.
- Sunarno, Siswanto. (2006) *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2015

No	Uraian	2015	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Pendapatan Daerah</b>		
2	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
3	Pajak Daerah	Rp 1.156.238.968.000	1.285.337.123.681,13
4	Retribusi Daerah	Rp 132.906.198.000	133.014.942.310,88
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 41.428.025.000	40.142.252.390,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 454.726.941.000	543.715.500.879,52
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 1.785.300.132.000</b>	<b>Rp2.002.209.819.262</b>
8			
9	<b>Pendapatan Transfer</b>		
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 153.043.013.000	Rp130.633.958.850
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 73.539.080.000	91.268.361.625,00
13	Dana Alokasi Umum	Rp 2.163.439.062.000	2.163.439.062.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 198.148.350.000	198.148.350.000,00
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 2.588.169.505.000</b>	<b>Rp2.583.489.732.475</b>
16			
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 645.831.700.000	645.831.700.000,00
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 645.831.700.000</b>	<b>Rp645.831.700.000</b>
20			
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 534.980.666.000	628.311.022.786,00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 534.980.666.000</b>	<b>Rp628.311.022.786</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 3.768.981.871.000</b>	<b>Rp3.857.632.455.261</b>
26			
27	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 257.831.035.000	168.929.305.495,00
29	Pendapatan hibah		275.592.750,00
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain	Rp 75.344.000	75.344.115,00
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	Rp 2.582.571.000	3.725.218.000,00
32	Bonus Produksi		
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 260.488.950.000</b>	<b>Rp173.005.460.360</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 5.814.770.953.000</b>	<b>Rp6.032.847.734.883</b>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	Belanja		
38	Belanja Operasi		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.551.825.107.000	2.266.711.324.120,36
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.457.838.443.000	1.229.964.063.386,00
41	Belanja Hibah	Rp 81.662.700.000	Rp64.372.714.150
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 33.158.500.000	Rp3.570.135.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 4.124.484.750.000</b>	<b>Rp3.564.618.236.656</b>
44			
45	Belanja Modal		
46	Belanja Tanah	Rp 159.261.228.000	Rp53.207.506.260
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 423.207.025.412	Rp319.887.626.325
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 734.394.422.468	Rp620.005.020.616
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 686.928.049.120	Rp466.547.146.437
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	Rp0
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp2.003.790.725.000</b>	<b>Rp1.459.647.299.638</b>
52			
53	Belanja Tidak Terduga		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 30.000.000.000	Rp12.727.609.296
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 30.000.000.000</b>	<b>Rp12.727.609.296</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 6.158.275.475.000</b>	<b>Rp5.036.993.145.590</b>
58			
59	Transfer		
60	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 84.212.401.000	Rp77.200.326.936
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 6.866.676.000	Rp5.617.562.556
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota	Rp 6.553.755.000	Rp3.897.223.731
64	Transfer Bantuan Keuangan		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 513.415.397.000	Rp513.293.540.525
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 1.197.070.000	Rp1.197.066.148
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 612.245.299.000</b>	<b>Rp601.205.719.896</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 6.770.520.774.000</b>	<b>Rp5.638.198.865.486</b>
70			
71	Surplus/(Defisit)	-Rp 955.749.821.000	Rp394.648.869.396
72			
73	Pembiayaan		
74	Penerimaan Pembiayaan		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 1.101.793.821.000	Rp1.101.793.821.407
76	Pencairan Dana Cadangan		
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain		
78	Pengembalian Dana Penguliran GMM		
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 1.101.793.821.000</b>	<b>Rp1.101.793.821.407</b>
80			
81	Pengeluaran Pembiayaan		
82	Pembentukan Cadangan	Rp 100.000.000.000	Rp100.000.000.000
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 46.044.000.000	Rp46.044.000.000
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 146.044.000.000</b>	<b>Rp146.044.000.000</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 955.749.821.000</b>	<b>Rp955.749.821.407</b>
87			
88	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 0	Rp1.350.398.690.803



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016

No	Uraian	2016	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Pendapatan Daerah</b>		
2	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
3	Pajak Daerah	Rp 1.357.161.868.000	Rp 1.520.926.774.878
4	Retribusi Daerah	Rp 136.700.632.000	Rp 136.756.227.055
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 43.992.572.000	Rp 43.075.638.051
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 527.967.807.000	Rp 591.417.034.817
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 2.065.822.879.000</b>	<b>Rp 2.292.175.674.801</b>
8			
9	<b>Pendapatan Transfer</b>		
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 198.632.431.000	Rp 186.473.773.873
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 72.208.593.000	Rp 81.443.298.346
13	Dana Alokasi Umum	Rp 1.917.780.234.000	Rp 1.917.780.234.000
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 548.828.939.000	Rp 506.469.716.920
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 2.737.450.197.000</b>	<b>Rp 2.692.167.023.139</b>
16			
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 326.384.354.000	Rp 326.384.354.000
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 326.384.354.000</b>	<b>Rp 326.384.354.000</b>
20			
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 592.885.664.000	Rp 577.023.348.996
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 592.885.664.000</b>	<b>Rp 577.023.348.996</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 3.656.720.215.000</b>	<b>Rp 3.595.574.726.135</b>
26			
27	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 85.431.652.000	Rp 82.587.284.810
29	Pendapatan hibah	Rp 9.000.000.000	Rp 2.943.000.000
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain		
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		
32	Bonus Produksi		
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 94.431.652.000</b>	<b>Rp 85.530.284.810</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 5.816.974.746.000</b>	<b>Rp 5.973.280.685.746</b>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	<b>Belanja</b>		
38	<b>Belanja Operasi</b>		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.604.535.496.000	Rp 2.530.403.511.147
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.527.616.453.000	Rp 1.354.774.042.566
41	Belanja Hibah	Rp 113.449.200.000	Rp 108.858.733.000
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 47.589.635.000	Rp 43.245.630.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 4.293.190.784.000</b>	<b>Rp 4.037.281.916.713</b>
44			
45	<b>Belanja Modal</b>		
46	Belanja Tanah	Rp 113.246.165.000	Rp 84.096.509.344
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 267.605.037.282	Rp 212.876.863.727
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 665.641.501.218	Rp 618.982.761.797
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 754.663.527.500	Rp 613.579.568.110
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp 12.294.519.600
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.801.156.231.000</b>	<b>Rp 1.541.830.222.578</b>
52			
53	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 16.000.000.000	Rp 12.850.933.650
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 16.000.000.000</b>	<b>Rp 12.850.933.650</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 6.110.347.015.000</b>	<b>Rp 5.591.963.072.941</b>
58			
59	<b>Transfer</b>		
60	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa</b>		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 103.924.183.662	Rp 103.883.708.383
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 5.675.972.338	Rp 5.673.569.269
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota		
64	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 781.128.858.000	Rp 762.583.137.135
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 1.197.070.000	Rp 1.197.066.148
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 891.926.084.000</b>	<b>Rp 873.337.480.935</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 7.002.273.099.000</b>	<b>Rp 6.465.300.553.876</b>
70			
71	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-Rp 1.185.298.353.000</b>	<b>-Rp 492.019.868.130</b>
72			
73	<b>Pembiayaan</b>		
74	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 1.350.398.353.000	Rp 1.349.935.661.274
76	Pencairan Dana Cadangan		
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain		
78	Pengembalian Dana Penguliran GMM		
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 1.350.398.353.000</b>	<b>Rp 1.349.935.661.274</b>
80			
81	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
82	Pembentukan Cadangan	Rp 75.000.000.000	Rp 75.000.000.000
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 90.100.000.000	Rp 90.100.000.000
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 165.100.000.000</b>	<b>Rp 165.100.000.000</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 1.185.298.353.000</b>	<b>Rp 1.184.835.661.274</b>
87			
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 692.815.793.144</b>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2017

No	Uraian	2017	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Pendapatan Daerah</b>		
2	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
3	Pajak Daerah	Rp 1.524.530.219.000	Rp 1.786.132.725.165
4	Retribusi Daerah	Rp 143.092.421.000	Rp 150.541.572.101
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 44.246.174.000	Rp 44.338.643.608
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 570.709.693.000	Rp 1.060.859.507.031
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 2.282.578.507.000</b>	<b>Rp 3.041.872.447.905</b>
8			
9	<b>Pendapatan Transfer</b>		
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 222.560.673.000	Rp 169.154.327.088
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 83.117.846.000	Rp 100.206.860.561
13	Dana Alokasi Umum	Rp 1.902.004.175.000	Rp 1.902.004.175.000
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 693.338.824.000	Rp 571.474.008.174
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 2.901.021.518.000</b>	<b>Rp 2.742.839.370.823</b>
16			
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 379.499.170.000	Rp 379.499.169.989
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 379.499.170.000</b>	<b>Rp 379.499.169.989</b>
20			
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 640.559.393.000	Rp 659.561.474.226
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 640.559.393.000</b>	<b>Rp 659.561.474.226</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 3.921.080.081.000</b>	<b>Rp 3.781.900.015.038</b>
26			
27	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 156.956.080.000	Rp 145.781.672.726
29	Pendapatan hibah	Rp 468.987.880.000	Rp 5.498.942.371
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain		
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		
32	Bonus Produksi		
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 625.943.960.000</b>	<b>Rp 151.280.615.097</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 6.829.602.548.000</b>	<b>Rp 6.975.053.078.040</b>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	<b>Belanja</b>		
38	<b>Belanja Operasi</b>		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.470.264.906.000	Rp 2.432.862.122.502
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.830.391.233.000	Rp 1.677.630.861.939
41	Belanja Hibah	Rp 239.326.151.000	Rp 221.563.642.076
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 38.000.000.000	Rp 34.614.400.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 4.577.982.290.000</b>	<b>Rp 4.366.671.026.517</b>
44			
45	<b>Belanja Modal</b>		
46	Belanja Tanah	Rp 71.265.518.000	Rp 61.410.018.464
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 289.941.678.566	Rp 258.569.327.855
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 618.561.610.807	Rp 572.794.887.766
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 727.313.903.600	Rp 545.261.276.718
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 87.911.931.027	Rp 87.116.541.820
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.794.994.642.000</b>	<b>Rp 1.525.152.052.623</b>
52			
53	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 15.000.000.000	Rp 14.613.548.327
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 15.000.000.000</b>	<b>Rp 14.613.548.327</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 6.387.976.932.000</b>	<b>Rp 5.906.436.627.467</b>
58			
59	<b>Transfer</b>		
60	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa</b>		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 129.758.618.000	Rp 129.576.404.562
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 5.675.972.000	Rp 5.618.107.731
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota		
64	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 907.774.563.000	Rp 832.914.114.078
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 1.197.070.000	Rp 1.197.066.148
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 1.044.406.223.000</b>	<b>Rp 969.305.692.519</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 7.432.383.155.000</b>	<b>Rp 6.875.742.319.986</b>
70			
71	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-Rp 602.780.607.000</b>	<b>Rp 99.310.758.054</b>
72			
73	<b>Pembiayaan</b>		
74	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 692.815.793.000	Rp 692.814.027.451
76	Pencairan Dana Cadangan		
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	Rp 20.664.814.000	Rp -
78	Pengembalian Dana Penggulangan GMM	Rp -	Rp 3.773.102.576
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 713.480.607.000</b>	<b>Rp 696.587.130.028</b>
80			
81	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
82	Pembentukan Cadangan	Rp 43.000.000.000	Rp 43.000.000.000
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 67.700.000.000	Rp 67.700.000.000
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 110.700.000.000</b>	<b>Rp 110.700.000.000</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 602.780.607.000</b>	<b>Rp 585.887.130.028</b>
87			
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 685.197.888.082</b>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2018

No	Uraian	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Daerah		
2	Pendapatan Asli Daerah		
3	Pajak Daerah	Rp 1.687.912.794.000	Rp 1.969.427.530.834
4	Retribusi Daerah	Rp 149.593.578.000	Rp 112.776.035.992
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 44.990.099.000	Rp 44.287.173.198
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 593.039.255.000	Rp 668.170.000.128
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 2.475.535.726.000</b>	<b>Rp 2.794.660.740.152</b>
8			
9	Pendapatan Transfer		
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 216.849.466.000	Rp 186.548.399.914
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 83.117.846.000	Rp 75.624.857.352
13	Dana Alokasi Umum	Rp 1.919.023.527.000	Rp 1.919.023.527.000
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 670.569.805.000	Rp 637.617.713.872
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 2.889.560.644.000</b>	<b>Rp 2.818.814.498.138</b>
16			
17	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 419.568.049.000	Rp 419.568.048.852
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 419.568.049.000</b>	<b>Rp 419.568.048.852</b>
20			
21	Transfer Pemerintah Provinsi		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 697.239.548.000	Rp 707.218.738.134
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 697.239.548.000</b>	<b>Rp 707.218.738.134</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 4.006.368.241.000</b>	<b>Rp 3.945.601.285.124</b>
26			
27	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 118.397.959.000	Rp 115.025.495.624
29	Pendapatan hibah	Rp 447.230.600.000	Rp 445.115.600.000
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain		
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		
32	Bonus Produksi		
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 565.628.559.000</b>	<b>Rp 560.141.095.624</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 7.047.532.526.000</b>	<b>Rp 7.300.403.120.900</b>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	<b>Belanja</b>		
38	<b>Belanja Operasi</b>		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.683.887.675.177	Rp 2.590.630.014.432
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.070.847.180.015	Rp 1.947.002.681.700
41	Belanja Hibah	Rp 533.018.751.000	Rp 518.180.271.989
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 22.924.600.000	Rp 22.264.100.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 5.310.678.206.192</b>	<b>Rp 5.078.077.068.121</b>
44			
45	<b>Belanja Modal</b>		
46	Belanja Tanah	Rp 59.305.094.700	Rp 56.217.001.450
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 495.468.423.203	Rp 416.727.502.290
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 481.264.757.222	Rp 389.882.846.384
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 532.176.133.000	Rp 366.117.540.867
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 82.070.957.683	Rp 84.890.521.099
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.650.285.365.808</b>	<b>Rp 1.313.835.412.090</b>
52			
53	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 20.000.000.000	Rp 15.098.334.272
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 20.000.000.000</b>	<b>Rp 15.098.334.272</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 6.980.963.572.000</b>	<b>Rp 6.407.010.814.483</b>
58			
59	<b>Transfer</b>		
60	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa</b>		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 150.943.306.000	Rp 150.943.305.022
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 8.033.540.000	Rp 8.033.539.248
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota		
64	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 752.488.029.000	Rp 735.731.101.427
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 3.245.313.000	Rp 3.245.312.500
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 914.710.188.000</b>	<b>Rp 897.953.258.197</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 7.895.673.760.000</b>	<b>Rp 7.304.964.072.680</b>
70			
71	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-Rp 848.141.234.000</b>	<b>-Rp 4.560.951.780</b>
72			
73	<b>Pembiayaan</b>		
74	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 684.801.420.000	Rp 685.197.397.351
76	Pencairan Dana Cadangan	Rp 218.000.000.000	Rp 218.000.000.000
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	Rp 20.664.814.000	Rp 20.664.814.429
78	Pengembalian Dana Penggulfiran GMM		
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 923.466.234.000</b>	<b>Rp 923.862.211.780</b>
80			
81	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
82	Pembentukan Cadangan		
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 75.325.000.000	Rp 72.923.815.400
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 75.325.000.000</b>	<b>Rp 72.923.815.400</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 848.141.234.000</b>	<b>Rp 850.938.396.380</b>
87			
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 846.377.444.600</b>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2019

No	Uraian	2019	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Pendapatan Daerah</b>		
2	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
3	Pajak Daerah	Rp 1.845.902.796.000	Rp 2.243.429.745.163
4	Retribusi Daerah	Rp 159.919.751.000	Rp 141.468.140.179
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 58.022.517.000	Rp 57.537.749.304
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 612.519.883.000	Rp 718.730.280.852
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 2.676.364.947.000</b>	<b>Rp 3.161.165.915.498</b>
8			
9	<b>Pendapatan Transfer</b>		
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 200.152.196.000	Rp 155.412.764.681
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 87.176.895.000	Rp 159.674.698.516
13	Dana Alokasi Umum	Rp 2.034.853.421.000	Rp 2.034.853.421.000
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 807.625.856.000	Rp 744.504.933.102
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 3.129.808.368.000</b>	<b>Rp 3.094.445.817.299</b>
16			
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 513.482.852.000	Rp 513.482.851.602
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 513.482.852.000</b>	<b>Rp 513.482.851.602</b>
20			
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 735.136.929.000	Rp 773.953.465.729
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 735.136.929.000</b>	<b>Rp 773.953.465.729</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 4.378.428.149.000</b>	<b>Rp 4.381.882.134.630</b>
26			
27	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 137.611.824.000	Rp 114.790.561.426
29	Pendapatan hibah	Rp 459.978.600.000	Rp 459.978.600.000
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain		
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		
32	Bonus Produksi	Rp 7.687.859.000	Rp 20.172.662.252
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 605.278.283.000</b>	<b>Rp 594.941.823.678</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 7.660.071.379.000</b>	<b>Rp 8.137.989.873.806</b>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	<b>Belanja</b>		
38	<b>Belanja Operasi</b>		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.829.105.704.000	Rp 2.683.322.816.568
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.423.472.310.000	Rp 2.232.903.738.362
41	Belanja Hibah	Rp 247.480.305.000	Rp 240.010.963.536
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 27.118.200.000	Rp 18.933.500.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 5.527.176.519.000</b>	<b>Rp 5.175.171.018.466</b>
44			
45	<b>Belanja Modal</b>		
46	Belanja Tanah	Rp 112.256.125.850	Rp 87.920.959.960
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 557.110.132.483	Rp 501.417.141.991
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 491.055.618.446	Rp 414.804.609.999
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 563.699.466.221	Rp 482.288.242.000
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 82.605.302.000	Rp 81.262.766.721
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.806.726.645.000</b>	<b>Rp 1.567.693.720.671</b>
52			
53	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 35.000.000.000	Rp 9.877.952.074
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 35.000.000.000</b>	<b>Rp 9.877.952.074</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 7.368.903.164.000</b>	<b>Rp 6.752.742.691.211</b>
58			
59	<b>Transfer</b>		
60	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa</b>		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 162.895.408.000	Rp 160.871.581.394
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 4.994.932.000	Rp 4.930.141.258
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota		
64	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 858.132.950.000	Rp 849.339.237.414
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 3.669.030.000	Rp 3.334.528.500
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 1.029.692.320.000</b>	<b>Rp 1.018.475.488.566</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 8.398.595.484.000</b>	<b>Rp 7.771.218.179.777</b>
70			
71	<b>Surplus/(De fisit)</b>	<b>-Rp 738.524.105.000</b>	<b>Rp 366.771.694.029</b>
72			
73	<b>Pembiayaan</b>		
74	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 846.364.143.000	Rp 846.364.143.135
76	Pencairan Dana Cadangan		
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain		
78	Pengembalian Dana Penggulfiran GMM		
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 846.364.143.000</b>	<b>Rp 846.364.143.135</b>
80			
81	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
82	Pembentukan Cadangan		
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 107.840.038.000	Rp 107.840.038.000
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Rp 107.840.038.000</b>	<b>Rp 107.840.038.000</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 738.524.105.000</b>	<b>Rp 738.524.105.135</b>
87			
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.105.295.799.164</b>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 6 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2020

No	Uraian	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Pendapatan Daerah</b>		
2	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
3	Pajak Daerah	Rp 1.576.416.115.000	Rp 1.857.411.776.716
4	Retribusi Daerah	Rp 130.262.331.434	Rp 128.914.969.533
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 67.887.501.000	Rp 67.102.677.276
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 688.055.814.117	Rp 756.725.928.757
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 2.462.621.761.551</b>	<b>Rp 2.810.155.352.282</b>
8			
9	<b>Pendapatan Transfer</b>		
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		
11	Bagi hasil Pajak	Rp 232.070.431.000	Rp 179.132.661.517
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 169.684.424.000	Rp 69.224.153.593
13	Dana Alokasi Umum	Rp 1.883.157.955.000	Rp 1.849.796.843.000
14	Dana Alokasi Khusus	Rp 721.197.724.190	Rp 727.777.631.873
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 3.006.110.534.190</b>	<b>Rp 2.825.931.289.983</b>
16			
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>		
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 574.595.346.000	Rp 574.120.558.252
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya</b>	<b>Rp 574.595.346.000</b>	<b>Rp 574.120.558.252</b>
20			
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		
22	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 922.326.487.901	Rp 726.326.745.171
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 922.326.487.901</b>	<b>Rp 726.326.745.171</b>
24			
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 4.503.032.368.091</b>	<b>Rp 4.126.378.593.406</b>
26			
27	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		
28	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 187.187.019.000	Rp 153.891.135.003
29	Pendapatan hibah	Rp 637.155.414.872	Rp 585.034.080.000
30	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain		
31	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		
32	Bonus Produksi	Rp 6.179.260.000	Rp 11.720.556.313
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Rp 830.521.693.872</b>	<b>Rp 750.645.771.316</b>
34			
35	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 7.796.175.823.514</b>	<b>Rp 7.687.179.717.004</b>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37	<b>Belanja</b>		
38	<b>Belanja Operasi</b>		
39	Belanja Pegawai	Rp 2.491.766.476.033	Rp 2.443.437.303.822
40	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.857.796.798.000	Rp 2.720.826.752.985
41	Belanja Hibah	Rp 301.756.854.000	Rp 257.143.590.699
42	Belanja Bantuan Sosial	Rp 71.606.200.000	Rp 52.356.765.000
43	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 5.722.926.328.033</b>	<b>Rp 5.473.764.412.506</b>
44			
45	<b>Belanja Modal</b>		
46	Belanja Tanah	Rp 49.358.941.793	Rp 22.253.503.350
47	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 495.544.704.609	Rp 474.711.654.581
48	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 587.025.053.478	Rp 480.304.901.380
49	Belanja Jalan dan Irigrasi	Rp 574.938.086.120	Rp 509.239.728.833
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 2.735.190.000	Rp 2.440.481.769
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.709.601.976.000</b>	<b>Rp 1.488.950.269.913</b>
52			
53	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
54	Belanja Tidak Terduga	Rp 416.434.853.481	Rp 394.033.804.687
55	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 416.434.853.481</b>	<b>Rp 394.033.804.687</b>
56			
57	<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 7.848.963.157.514</b>	<b>Rp 7.356.748.487.106</b>
58			
59	<b>Transfer</b>		
60	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa</b>		
61	Bagi Hasil Pajak	Rp 191.432.867.000	Rp 191.432.863.870
62	Bagi Hasil Retribusi	Rp 6.348.821.000	Rp 6.348.819.916
63	Belanja Bagi Hasil Dari Pendapatan Lainnya Kepada Kabupaten/Kota		
64	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>		
65	Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 851.213.817.000	Rp 847.450.250.187
66	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 3.512.960.000	Rp 3.512.959.500
67	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp 1.052.508.465.000</b>	<b>Rp 1.048.744.893.473</b>
68			
69	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>Rp 8.901.471.622.514</b>	<b>Rp 8.405.493.380.579</b>
70			
71	<b>Surplus/(De fisit)</b>	<b>-Rp 1.105.295.799.000</b>	<b>-Rp 718.313.663.575</b>
72			
73	<b>Pembiayaan</b>		
74	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
75	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 1.105.295.799.000	Rp 1.105.295.799.164
76	Pencairan Dana Cadangan		
77	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain		
78	Pengembalian Dana Pengguliran GMM		
79	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 1.105.295.799.000</b>	<b>Rp 1.105.295.799.164</b>
80			
81	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
82	Pembentukan Cadangan		
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
84	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>Rp -</b>
85			
86	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 1.105.295.799.000</b>	<b>Rp 1.105.295.799.164</b>
87			
88	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 386.982.135.589</b>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

